

**MANAJEMEN PROYEK SEKTOR PUBLIK: TELAAH
KONSEPTUAL DAN STUDI KASUS PADA ORGANISASI
PUBLIK DI INDONESIA**

Oleh

ABDI FAJAR IMANI

2426061018



**JURUSAN MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2025

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penulisan	2
1.4 Metodologi	2
BAB II TELAAH KONSEPTUAL	3
2.1. Definisi Manajemen Proyek Sektor Publik.....	3
2.2 Karakteristik Manajemen Proyek Sektor Publik.....	3
2.3 Evolusi Teori Manajemen Proyek Sektor Publik	5
BAB III STUDI KASUS	7
3.1 Pemilihan Organisasi Publik Trans Jakarta.....	7
3.2 Deskripsi Organisasi Transjakarta.....	7
3.2.1 Sejarah Singkat Transjakarta.....	7
3.2.2 Visi dan Misi Transjakarta	8
3.2.3 Struktur Organisasi Transjakarta.....	8
3.3 Analisis Manajemen Proyek di Transjakarta.....	9
3.3.1 Proyek-proyek Utama Transjakarta	9
3.3.2 Pendekatan Manajemen Proyek di Transjakarta	10
3.3.3 Tantangan yang dihadapi Transjakarta.....	11
3.3.4 Solusi yang diterapkan oleh Transjakarta	12
3.3.5 Evaluasi Keberhasilan Proyek Transjakarta.....	12
BAB IV KESIMPULAN	13
4.1 Ringkasan Temuan	13
4.2 Implikasi dan Tantangan	13
4.3 Solusi untuk Peningkatan Manajemen.....	14
4.4 Prospek ke Depan.....	14

DAFTAR PUSTAKA.....15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manajemen proyek sektor publik adalah komponen vital dalam pengelolaan pembangunan sosial yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Sektor publik bertanggung jawab atas penyediaan berbagai layanan vital seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan transportasi. Proyek-proyek ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas, termasuk pada stabilitas sosial dan ekonomi negara.

Namun, manajemen proyek sektor publik memiliki tantangan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan sektor swasta. Salah satu tantangannya adalah tingginya tingkat birokrasi yang terlibat dalam setiap tahap proyek, mulai dari perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Proyek sektor publik juga sering kali dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, baik dalam hal anggaran maupun waktu. Oleh karena itu, manajemen proyek di sektor publik memerlukan pendekatan yang lebih sistematis dan terstruktur untuk memastikan bahwa proyek dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif.

Di Indonesia, sektor publik memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan negara, dengan proyek-proyek yang melibatkan pengelolaan anggaran negara yang signifikan. Dalam hal ini, pemerintah daerah maupun pusat bertanggung jawab atas pengelolaan proyek-proyek publik yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari dan menganalisis bagaimana manajemen proyek sektor publik diterapkan dalam konteks Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a) Apa definisi dan karakteristik manajemen proyek sektor publik?
- b) Bagaimana evolusi teori manajemen proyek sektor publik dari masa ke masa?
- c) Bagaimana penerapan manajemen proyek sektor publik dalam organisasi publik di Indonesia?
- d) Apa tantangan yang dihadapi dalam manajemen proyek sektor publik di Indonesia, dan bagaimana cara mengatasinya?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan paper ini adalah:

- a) Untuk memahami konsep dasar manajemen proyek sektor publik dan karakteristiknya.
- b) Untuk menganalisis evolusi teori manajemen proyek sektor publik.
- c) Untuk menilai penerapan konsep manajemen proyek sektor publik pada studi kasus organisasi publik di Indonesia.
- d) Untuk memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi dalam manajemen proyek sektor publik di Indonesia dan solusi yang dapat diterapkan.

1.4 Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur dan studi kasus. Data dikumpulkan dari berbagai buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen terkait yang memberikan wawasan tentang manajemen proyek sektor publik. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi kasus tentang Transjakarta, sebuah organisasi publik yang mengelola sistem transportasi publik di Jakarta, Indonesia.

BAB II

TELAAH KONSEPTUAL

2.1 Definisi Manajemen Proyek Sektor Publik

Manajemen proyek sektor publik adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi proyek yang didanai oleh sumber daya publik untuk memenuhi tujuan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan proyek sektor swasta yang berorientasi pada keuntungan finansial, proyek sektor publik lebih bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan infrastruktur.

Menurut Kerzner (2017), manajemen proyek sektor publik mencakup serangkaian kegiatan yang melibatkan pengelolaan sumber daya, waktu, biaya, dan risiko untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proyek sektor publik harus mempertimbangkan berbagai faktor eksternal, seperti kebijakan pemerintah, regulasi, dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, proyek sektor publik juga harus mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang bersumber dari pajak rakyat kepada badan pengawas baik internal maupun eksternal.

2.2 Karakteristik Manajemen Proyek Sektor Publik

Manajemen proyek sektor publik memiliki karakteristik yang membedakannya dari sektor swasta. Beberapa karakteristik utama manajemen proyek sektor publik adalah:

1. Tujuan Sosial dan Publik:

Proyek sektor publik berfokus pada tujuan sosial, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan pendidikan, dan perawatan kesehatan, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Proyek ini tidak berorientasi pada profit, tetapi lebih kepada pemenuhan kebutuhan dasar dan perbaikan kualitas hidup masyarakat.

2. Pendanaan dari Anggaran Negara:

Proyek sektor publik biasanya dibiayai dengan menggunakan dana publik, baik dari anggaran negara maupun daerah. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran proyek ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan transparan untuk menghindari pemborosan dan penyalahgunaan dana.

3. Birokrasi yang Kompleks:

Proyek sektor publik seringkali melibatkan banyak pihak dalam proses pengambil keputusan, mulai dari instansi pemerintah pusat hingga daerah, lembaga legislatif, dan masyarakat. Proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pihak ini sering kali memperlambat pelaksanaan proyek.

4. Pengawasan yang Ketat:

Mengingat proyek sektor publik dibiayai oleh uang rakyat, maka proyek ini harus diawasi dengan ketat oleh badan pengawas internal maupun eksternal. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan perencanaan dan tidak terjadi penyalahgunaan anggaran.

5. Keterlibatan Berbagai Stakeholder:

Berbeda dengan proyek sektor swasta yang lebih sederhana dalam hal pengambilan keputusan, proyek sektor publik melibatkan banyak pemangku kepentingan, seperti pemerintah, masyarakat, organisasi non-pemerintah (NGO), dan sektor swasta. Keterlibatan berbagai pihak ini mengharuskan adanya koordinasi yang baik agar proyek dapat berjalan dengan lancar.

6. Keterbatasan Waktu dan Sumber Daya:

Proyek sektor publik sering kali memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya, baik itu sumber daya manusia, anggaran, maupun waktu. Oleh karena itu, perencanaan dan pengelolaan proyek harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar sumber daya yang terbatas dapat digunakan secara efisien.

2.3 Evolusi Teori Manajemen Proyek Sektor Publik

Seiring dengan perkembangan manajemen proyek dan perubahan dalam kebijakan publik, teori manajemen proyek sektor publik telah mengalami evolusi. Berikut adalah beberapa tahap utama dalam evolusi teori manajemen proyek sektor publik:

1. Pendekatan Tradisional:

Pada awalnya, manajemen proyek sektor publik berfokus pada efisiensi dan kontrol. Proyek-proyek publik pada masa ini lebih banyak mengadopsi pendekatan tradisional yang lebih terpusat pada kontrol administratif dan pengelolaan anggaran yang ketat. Namun, pendekatan ini sering kali dianggap terlalu birokratis dan tidak responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat.

2. *New Public Management* (NPM):

Pada akhir abad ke-20, muncul paradigma *New Public Management* (NPM) yang memperkenalkan prinsip-prinsip manajerial dari sektor swasta ke dalam sektor publik. Pendekatan ini lebih menekankan pada hasil dan efisiensi, serta pengurangan birokrasi. Beberapa elemen utama dari NPM termasuk pengukuran kinerja, pengelolaan berbasis hasil, dan desentralisasi pengambilan keputusan.

Hood (1991) dalam teori NPM menekankan pentingnya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan cara yang lebih efisien dan berbasis pada prinsip-prinsip manajerial yang diterapkan dalam dunia bisnis.

3. Manajemen Proyek Partisipatif:

Di era modern, semakin banyak organisasi sektor publik yang mengadopsi pendekatan manajemen proyek partisipatif. Pendekatan ini menekankan pada pentingnya melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam setiap tahap proyek, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proyek yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

4. Pendekatan Terpadu:

Pada saat ini, manajemen proyek sektor publik cenderung mengadopsi pendekatan yang lebih terintegrasi, di mana berbagai sektor yang berbeda bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Misalnya, dalam pembangunan infrastruktur, berbagai kementerian dan badan pemerintah bekerja sama untuk merencanakan dan melaksanakan proyek, dengan tujuan untuk menciptakan dampak sosial yang positif.

BAB III

STUDI KASUS ORGANISASI PUBLIK DI INDONESIA

3.1 Pemilihan Organisasi Publik: Transjakarta

Transjakarta adalah salah satu contoh paling menonjol dari organisasi publik yang mengelola transportasi publik di Jakarta, Indonesia. Sebagai proyek sektor publik yang didanai oleh anggaran daerah, Transjakarta bertujuan untuk mengurangi kemacetan dan menyediakan sistem transportasi yang efisien dan terjangkau bagi masyarakat Jakarta. Sebagai ibu kota negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dan terus berkembang, Jakarta menghadapi masalah kemacetan yang sangat serius, yang menyebabkan penurunan kualitas hidup, kerugian ekonomi, serta peningkatan polusi udara.

Pada tahun 2004, Transjakarta diluncurkan dengan harapan dapat mengatasi permasalahan kemacetan di kota ini melalui sistem Bus Rapid Transit (BRT), yang menyediakan jalur bus khusus yang terpisah dari kendaraan pribadi. Transjakarta, yang awalnya hanya memiliki beberapa rute, kini telah berkembang menjadi sistem transportasi yang melayani ratusan ribu penumpang setiap hari, dengan lebih dari 13 koridor yang tersebar di seluruh kota.

Meskipun diluncurkan dengan tujuan mulia, Transjakarta tidak terlepas dari tantangan besar yang terkait dengan manajemen proyek sektor publik, termasuk masalah pendanaan, koordinasi antar pemerintah daerah, serta penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi pengguna. Oleh karena itu, Transjakarta menjadi studi kasus yang sangat relevan dalam menganalisis bagaimana manajemen proyek sektor publik diterapkan dalam konteks Indonesia.

3.2 Deskripsi Organisasi Transjakarta

3.2.1 Sejarah Singkat Transjakarta

Transjakarta pertama kali dioperasikan pada 15 Januari 2004, dengan tujuan utama untuk mengurangi kemacetan di Jakarta, yang merupakan salah satu kota dengan tingkat kemacetan tertinggi di dunia. Pada awalnya, Transjakarta hanya memiliki

satu koridor yang menghubungkan Blok M dan Kota. Namun, seiring dengan meningkatnya permintaan akan transportasi umum yang lebih baik dan efisien, Transjakarta terus mengembangkan jaringan koridor busway yang kini mencakup lebih dari 13 koridor di seluruh Jakarta.

Dengan menggunakan konsep Bus Rapid Transit (BRT), Transjakarta memungkinkan bus-busnya untuk melaju lebih cepat karena menggunakan jalur khusus yang terpisah dari lalu lintas kendaraan pribadi. Sistem ini terbukti lebih efisien dan dapat mengangkut penumpang dalam jumlah yang besar dibandingkan dengan transportasi umum lainnya, seperti angkutan kota dan taksi. Keberhasilan awal Transjakarta mendorong pemerintah daerah Jakarta untuk terus memperluas sistem ini, baik dari segi jumlah rute, armada, maupun fasilitas pendukung.

3.2.2 Visi dan Misi Transjakarta

Visi Transjakarta adalah menjadi penyedia transportasi publik terbaik di Asia Tenggara, yang berfokus pada efisiensi, kenyamanan, dan keberlanjutan. Misi dari Transjakarta adalah menyediakan transportasi yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendukung mobilitas masyarakat Jakarta. Dalam menjalankan misi tersebut, Transjakarta berusaha untuk memberikan solusi transportasi yang ramah lingkungan, mengurangi kemacetan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan alternatif transportasi yang terjangkau dan dapat diandalkan.

3.2.3 Struktur Organisasi Transjakarta

Transjakarta dikelola oleh PT. Transportasi Jakarta, yang merupakan anak perusahaan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebagai sebuah organisasi publik, Transjakarta bertanggung jawab langsung kepada Gubernur DKI Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Struktur organisasi Transjakarta terdiri dari Direksi yang dipimpin oleh seorang Direktur Utama dan didukung oleh berbagai direktorat yang masing-masing menangani berbagai aspek operasional, seperti pengelolaan armada, pengembangan infrastruktur, pemasaran, serta sumber daya manusia. Selain itu, Transjakarta juga berkolaborasi dengan berbagai lembaga dan instansi pemerintah lainnya, baik di tingkat provinsi maupun pusat, untuk mendukung operasionalnya.

3.3 Analisis Manajemen Proyek di Transjakarta

Manajemen proyek di Transjakarta melibatkan berbagai tahap, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi. Dalam mengelola proyek-proyek besar yang melibatkan anggaran negara, Transjakarta harus memastikan bahwa setiap proyek berjalan sesuai dengan tujuan, tepat waktu, dan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Berikut adalah beberapa aspek penting yang dianalisis dalam manajemen proyek Transjakarta.

3.3.1 Proyek-Proyek Utama Transjakarta

1. Pengembangan Jalur Busway

Salah satu proyek utama yang dilakukan oleh Transjakarta adalah pengembangan dan perluasan jalur busway. Jalur busway dirancang untuk memisahkan bus Transjakarta dari kendaraan pribadi sehingga bus dapat melaju dengan lebih cepat dan mengurangi kemacetan. Dalam beberapa tahun terakhir, Transjakarta telah menambah beberapa koridor baru yang menghubungkan berbagai titik penting di Jakarta. Pembangunan jalur busway juga melibatkan integrasi dengan moda transportasi lain, seperti kereta commuter line (KRL), sehingga memungkinkan masyarakat untuk berpindah moda transportasi dengan mudah.

2. Sistem Pembayaran Elektronik

Salah satu inovasi yang diimplementasikan oleh Transjakarta adalah sistem pembayaran elektronik yang memungkinkan penumpang untuk menggunakan kartu elektronik atau aplikasi mobile untuk membayar tiket. Sistem ini tidak hanya memudahkan penumpang, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi antrean, dan meminimalkan risiko kebocoran pendapatan.

3. Peningkatan Kualitas Armada

Transjakarta terus melakukan peningkatan kualitas armada bus yang digunakan. Selain menambah jumlah armada, Transjakarta juga memperkenalkan bus-bus dengan standar kualitas tinggi yang lebih ramah

lingkungan, seperti bus listrik, untuk mendukung program pengurangan emisi gas rumah kaca di Jakarta.

3.3.2 Pendekatan Manajemen Proyek di Transjakarta

Dalam menjalankan proyek-proyek besar ini, Transjakarta mengadopsi pendekatan manajemen proyek yang mengutamakan efisiensi dan pengelolaan sumber daya yang baik. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah *New Public Management* (NPM), yang menekankan pada peningkatan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan proyek sektor publik. Beberapa elemen yang diterapkan dalam manajemen proyek Transjakarta antara lain:

- 1. Perencanaan yang Sistematis**

Transjakarta melakukan perencanaan proyek dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kebutuhan transportasi masyarakat, kapasitas anggaran, dan keterbatasan sumber daya. Setiap proyek yang diusulkan harus melalui proses kajian kelayakan yang melibatkan berbagai pihak terkait, baik dari pemerintah daerah maupun sektor swasta.

- 2. Pelaksanaan yang Terkoordinasi**

Pelaksanaan proyek di Transjakarta melibatkan koordinasi yang baik antar berbagai unit organisasi, baik di dalam Transjakarta sendiri maupun dengan lembaga pemerintah lainnya. Selain itu, Transjakarta juga melakukan kerjasama dengan pihak swasta, seperti perusahaan transportasi dan penyedia teknologi, untuk mendukung pelaksanaan proyek.

- 3. Pengawasan dan Evaluasi Berkala**

Setiap proyek yang dilaksanakan oleh Transjakarta selalu diawasi dengan ketat oleh badan pengawas internal dan eksternal. Selain itu, evaluasi berkala juga dilakukan untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan perencanaan dan memberikan dampak yang diinginkan.

3.3.3 Tantangan yang Dihadapi Transjakarta

Meskipun Transjakarta telah mencapai berbagai keberhasilan dalam mengelola transportasi publik di Jakarta, proyek-proyek yang dilaksanakan tetap dihadapkan pada berbagai tantangan. Beberapa tantangan utama yang dihadapi Transjakarta antara lain:

1. Keterbatasan Anggaran

Sebagai organisasi publik yang mengandalkan anggaran negara, Transjakarta sering kali dihadapkan pada keterbatasan anggaran yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan proyek. Pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien sangat penting untuk memastikan bahwa setiap proyek dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai anggaran.

2. Koordinasi Antar Pemerintah

Transjakarta tidak beroperasi secara terisolasi, tetapi membutuhkan koordinasi yang erat dengan berbagai lembaga pemerintah lainnya, baik di tingkat provinsi maupun pusat. Ketidakselarasan kebijakan dan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah sering kali menjadi hambatan dalam pelaksanaan proyek.

3. Tantangan Sosial dan Budaya

Penggunaan transportasi umum di Jakarta masih terhambat oleh preferensi masyarakat yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Meskipun Transjakarta telah berusaha untuk menyediakan transportasi yang lebih nyaman dan efisien, mengubah perilaku masyarakat dan mengedukasi mereka tentang manfaat menggunakan transportasi umum masih menjadi tantangan besar.

3.3.4 Solusi yang Diterapkan oleh Transjakarta

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, Transjakarta telah menerapkan beberapa solusi, antara lain:

- a) Meningkatkan Kerjasama dengan Sektor Swasta: Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, Transjakarta memperluas kerjasama dengan sektor swasta dalam hal penyediaan armada dan teknologi. Model kemitraan ini membantu mengurangi beban anggaran pemerintah daerah.
- b) Peningkatan Infrastruktur dan Fasilitas: Transjakarta terus memperbaiki infrastruktur dan fasilitas, seperti halte yang lebih nyaman dan aman, serta sistem pembayaran yang lebih efisien, untuk menarik lebih banyak penumpang dan meningkatkan kepuasan pelanggan.
- c) Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat: Transjakarta juga melaksanakan kampanye edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan transportasi publik untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara.

3.3.5 Evaluasi Keberhasilan Proyek Transjakarta

Keberhasilan proyek Transjakarta dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain:

- a) Peningkatan Jumlah Penumpang: Sejak pertama kali beroperasi, jumlah penumpang Transjakarta terus meningkat, yang menunjukkan bahwa sistem BRT yang diterapkan semakin diminati oleh masyarakat.
- b) Pengurangan Kemacetan: Pengembangan jalur busway telah membantu mengurangi kemacetan di beberapa titik utama di Jakarta, meskipun kemacetan total di kota ini masih menjadi masalah besar.
- c) Kepuasan Pelanggan: Survei kepuasan pelanggan menunjukkan bahwa mayoritas pengguna Transjakarta merasa puas dengan layanan yang diberikan, meskipun ada beberapa area yang masih perlu diperbaiki, seperti kenyamanan armada dan ketepatan waktu.

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Ringkasan Temuan

Manajemen proyek sektor publik memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan pelayanan publik yang efisien dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, proyek sektor publik seperti Transjakarta menunjukkan bahwa meskipun ada banyak tantangan, manajemen proyek yang baik dapat memberikan hasil yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Transjakarta berhasil mengatasi tantangan kemacetan Jakarta dengan menyediakan sistem transportasi publik yang lebih efisien. Pengelolaan proyek yang sistematis, penggunaan teknologi untuk pembayaran elektronik, dan pengembangan jalur busway merupakan contoh penerapan manajemen proyek sektor publik yang efektif.

Namun, proyek sektor publik juga menghadapi tantangan seperti birokrasi yang kompleks, keterbatasan anggaran, serta perubahan kebijakan politik yang dapat memengaruhi kelancaran pelaksanaan proyek. Oleh karena itu, pengelolaan yang tepat dan berfokus pada hasil sangat diperlukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

4.2 Implikasi dan Tantangan

Manajemen proyek sektor publik di Indonesia harus mampu menghadapi tantangan birokrasi, keterbatasan anggaran, dan ketidakpastian politik. Proyek sektor publik sering kali terhambat oleh proses pengambilan keputusan yang lambat dan ketergantungan pada dana yang terbatas. Di sisi lain, sektor publik harus tetap bertanggung jawab untuk mencapai tujuan sosial yang lebih besar, seperti pengurangan kemacetan, penyediaan layanan pendidikan, dan kesehatan yang lebih baik.

Pengawasan yang transparan dan efisien juga menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara optimal. Selain itu, koordinasi antar

lembaga pemerintah harus ditingkatkan agar proses pengambilan keputusan lebih cepat dan lebih terarah.

4.3 Solusi untuk Peningkatan Manajemen Proyek Sektor Publik

Untuk meningkatkan efektivitas manajemen proyek sektor publik, beberapa solusi yang dapat diterapkan antara lain:

1. Penguatan Koordinasi antara berbagai instansi pemerintah untuk memastikan kelancaran pelaksanaan proyek.
2. Pemanfaatan Teknologi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
3. Penerapan Prinsip New Public Management (NPM) untuk mengadopsi prinsip efisiensi, hasil, dan akuntabilitas dalam proyek publik.

4.4 Prospek Ke Depan

Di masa depan, sektor publik Indonesia diharapkan dapat mengelola proyek-proyek lebih efektif dengan meningkatkan penerapan teknologi dan memperkuat kapasitas manajerial. Dengan peningkatan koordinasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat, sektor publik dapat mencapai hasil yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan yang lebih berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bormasa, A., Alaslan, A., & Fajrillah, F. (2023). *Good Governance dalam Manajemen Sektor Publik*. Jurnal Administrasi Publik, 12(1), 45-60.
- Hood, C. (1991). *A Public Management for All Seasons?* Public Administration, 69(1), 3-19.
- Kartiwa, D. (2012). *Manajemen Sektor Publik*. Rajawali Pers.
- Muhammad, A. (2019). *Manajemen Sektor Publik: Teori dan Praktik*. Graha Ilmu.
- Kerzner, H. (2017). *Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling* (12th ed.). Wiley.
- Kwak, Y. H., & Ibbs, C. W. (2014). *Project Management Process Maturity (PM): The Case of the U.S. Army Corps of Engineers'. International Journal of Project Management, 32(4), 1-13.
- PMI. (2021). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)*. Project Management Institute.
- Setijabudi, S., & Wijaya, H. (2016). *Peningkatan Kinerja Layanan Organisasi Publik Melalui Penerapan Manajemen Stratejik*. Jurnal Administrasi Negara, 12(2), 123-135.
- Siregar, N. (2018). *Manajemen Proyek Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Transjakarta. (2025). *Transjakarta*. Wikipedia. Diakses dari <https://en.wikipedia.org/wiki/Transjakarta>